

PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH) DAN DANA DESA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KORIDOR BALI – NUSA TENGGARA

Nova Rizky Ning Putri^a, Ida Nuraini^b

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Malang Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Indonesia

* Corresponding author: novarizkyaningp18@gmail.com

Artikel Info

Article history:

Received 20/01/2023

Revised 07/06/2023

Accepted 09/06/2023

Available online 26/06/2023

Keyword: economic growth; profit-sharing funds; village funds

JEL Classification
E62, 023

Copyright (c) 2023 Putri,
N. R. N. & Nuraini, I.



This work is licensed
under a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial-
ShareAlike 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Abstract

This study aims to determine the effect of profit-sharing funds and village funds with capital expenditure as a moderating variable in the Bali-Nusa Tenggara Corridor. The data used is secondary data obtained from BPS and the directorate general of financial balances using the panel data regression method using the random effects model and moderating regression analysis for the moderation test. The results of this study indicate that revenue sharing and village funds have a significant effect on economic growth in the Bali-Nusa Tenggara Corridor with capital expenditure acting as a moderating variable.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil dan dana desa dengan belanja modal sebagai variabel moderasi di Koridor Bali-Nusa Tenggara. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS dan direktorat jenderal perimbangan keuangan dengan metode regresi data panel menggunakan model random effect dan moderating regression analysis untuk uji moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil dan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Koridor Bali-Nusa Tenggara dengan belanja modal berperan sebagai variabel moderating.

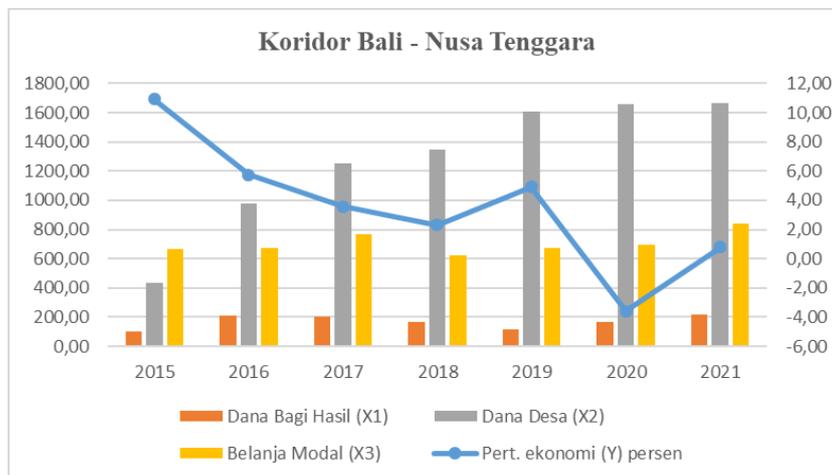
PENDAHULUAN

Ekonomi ideal ditentukan oleh kondisi harga yang stabil dan kesempatan kerja yang luas. Namun pada kenyataannya, kondisi ekonomi pada umumnya bergejolak (Muttakin, Fatkhur & Cahyono, 2017). Sebagai bentuk upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, suatu negara akan lebih mudah melakukan pembangunan ekonomi melalui koridor ekonomi, yang mana hal ini sudah terklasifikasi bahwa koridor ekonomi memiliki daerah-daerah yang sifat ataupun karakteristik nya hampir sama. Satu bagian strategi

mempercepat dan menjangkau pembangunan ekonomi yang lebih luas di Indonesia adalah dengan melewati bagian koridor ekonomi Negara Indonesia yang salah satunya ada koridor ekonomi Bali – Nusa Tenggara. Perubahan yang terjadi dan menyesuaikan sistem sosial dengan menghiraukan keberagaman kebutuhan maupun kemauan perorangan dan kelompok guna memajukan kualitas hidup materil dan spiritual juga merupakan esensi pembangunan (Saputra, 2016).

Dalam implementasinya, pembangunan ekonomi yang maksimal diharapkan dapat membantu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah ataupun wilayah. Yang mana didalamnya juga akan meningkatkan jumlah produk barang atau jasa serta nilai tambah dari berbagai unit produksi yang ada didalam suatu daerah. Untuk bisa melihat perkembangan ekonomi, laju PDRB dapat menjadi salah satu ukurannya. Menurut (Badan Pusat Statistik, 2022) PDRB ini keseluruhan nilai plus bruto dari berbagai badan usaha didaerah serta hasil penambahan dari barang dan jasa seluruh sektor ekonomi yang nantinya menambah nilai perekonomian daerah itu sendiri. Terdapat beberapa instrumen perekonomian yang secara jelas bisa menggambarkan income perkapita maupun instrumen lainnya untuk ukuran ekonomi (Dewi & Sutrisna, 2015).

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, dan Belanja Modal Koridor Bali – Nusa Tenggara tahun 2015 – 2021



Sumber: BPS Bali, NTB, NTT 2022

Pertumbuhan ekonomi yang baik mencerminkan tercapainya tingkat kesejahteraan penduduk yang ada didalam suatu negara ataupun daerah daerah didalamnya. Kondisi perkembangan output maupun perolehan tiap individu dapat menggambarkan kualitas kemakmuran penduduk, selain itu keadaan yang terjadi didalam pasar per wilayah juga menentukan dengan banyaknya pilihan untuk memenuhi daya beli masyarakat (Affandi et al., 2021). Mengacu dari hasil pengolahan grafik 1.1 diatas dapat dilihat dengan satuan persen untuk pertumbuhan ekonomi, pada grafik tersebut terlihat untuk

pertumbuhan ekonomi dengan garis berwarna biru dan satuan yang berada di sebelah kanan, dimana daerah koridor Bali – Nusa Tenggara memiliki kondisi pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi, dimulai pada tahun 2015 diketahui besaran pertumbuhan ekonomi berada pada 10,94% yang kemudian pada tahun selanjutnya yaitu 2016 – 2018 justru mengalami penurunan di 5,76% dan 3,59% yang hingga menyentuh range 2,31% di tahun 2018. Dilain itu juga terlihat bahwa peningkatan terjadi pada tahun 2019 berada di angka 4,92% dan berlanjut dengan penurunan hingga bernilai negatif yaitu berada diangka sebesar -3,60% untuk tahun 2020. Jika dilihat dengan fenomena yang terjadi pada tahun 2020 lalu, penurunan nilai pertumbuhan PDRB ini bisa disebabkan karena terjadinya wabah covid-19 dengan dampaknya semua kegiatan diminimalisir untuk beroperasi yang didalamnya termasuk kegiatan perekonomian. Namun ditahun selanjutnya yaitu 2021, terlihat jika pertumbuhan PDRB wilayah koridor Bali – Nusa Tenggara kembali mengalami perbaikan yaitu mencapai angka 0,78%.

Upaya untuk membangun pertumbuhan ekonomi melalui ruang lingkup koridor ekonomi ini, suatu daerah dalam koridor tersebut memiliki peran yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang salah satunya yaitu melalui pengelolaan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal disini sangat erat kaitannya dengan alokasi penerimaan dan anggaran pengeluaran per masing-masing daerah. Dimana daerah berkewajiban supaya mampu mengatur kondisi daerahnya sendiri termasuk pengelolaan dana dengan dasar UU otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan independensi daerah mereka berdaulat untuk menentukan penggunaan dana yang akan digunakan untuk pembangunan daerahnya. Disisi lain demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah sebagai pemegang kendali dalam hal anggaran dan pengelolaannya terasuk bagi masing-masing daerah (Waryanto, 2017). Dimana daerah tersebut akan saling berbeda untuk dapat mengelola pendanaan urusannya yang akan mengakibatkan ketimpangan fiskal disetiap daerah. Sebagai solusi dalam menghadapi kondisi itu, dibagikan dana dari APBN untuk pemerintah khususnya daerah yang salah satu bentuk pengalokasian dana itu adalah dana bagi hasil (DBH) yang sumbernya timbul dari kekayaan daerah dan juga pajak sebagai alokasi pendanaan untuk keperluan daerah mewujudkan desentralisasi. Dbh salah satu asal perolehan daerah yang tersembunyi guna pembangunan dan bermanfaat dalam mencukupi belanja modal dilain perolehan asli daerah serta dana alokasi umum (Cahyaning, 2018). Dana Bagi Hasil (DBH) wilayah koridor Bali – Nusa Tenggara selama tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2015-2016 DBH meningkat dari angka 104,24 milyar ke 212,75 milyar, namun pada tahun selanjutnya dana bagi hasil mengalami penurunan yaitu di tahun 2017 menjadi 201,33 milyar, hal ini terus terjadi pada tahun 2018 yakni 196,56 milyar. Di tahun 2019 dengan nilai penurunan akhir sebesar 116,74 milyar dan kembali meningkat lagi untuk

tahun selanjutnya yaitu 2020-2021 sampai di angka sebesar 169,14 milyar hingga 220,04 milyar rupiah.

Selain Dana Bagi Hasil yang berasal dari APBN sebagai modal pendanaan suatu daerah, dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pun tidak hanya menitikberatkan pada daerah saja akan tetapi juga pada pemerintah desa. Maka dari itu pemerintah desa perlu mendapatkan sumber pendapatan untuk bisa melakukan pembangunan dan melaksanakan wewenangnya dalam hal mengatur dan mengelola pemerintahan maupun keperluan rakyatnya. Ditentukan dalam UU Desa, pemerintah mempunyai program untuk perolehan aset desa yaitu Dana Alokasi Desa atau Dana Desa. Dari Dana Desa ini pemerintah desa bisa melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan yang salah satu contohnya yaitu dengan peningkatan pelayanan publik. Perputaran ekonomi didukung oleh dana desa sebagai dasar biaya daerah desa untuk pembangunan fasilitas, pengembangan potensi daerah serta penanggulangan masalahnya (Prasetyo & Dinarjito, 2021). Modal desa berupa dana desa ini pertamakali dianggarkan pada tahun 2015, yang ditahun tersebut wilayah koridor Bali – Nusa Tenggara memiliki nilai Dana Desa sebesar 433,37 juta rupiah. Sementara itu perolehan dana desa terus terjadi peningkatan tiap tahunnya yaitu 981,03 di tahun 2016 kemudian 1.254,21 milyar untuk tahun 2017. Pada tahun 2018 nilai dana desa menyentuh 1.349,61 milyar dan terus berlanjut pada tahun 2019-2020 yaitu 1.610,67 dan 1.659,89 milyar rupiah. Hingga mencapai dana desa dengan nilai tertinggi ada pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.662,17 milyar rupiah.

Faktor lain yang menjadi komponen pendukung tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan berkaitan dengan peraturan otonomi daerah yaitu Belanja Modal. Pengeluaran modal termasuk poin yang esensial agar dapat melakukan pembangunan sepadan dengan pembengkakan penduduk. (Harahap et al., 2018). Perkiraan belanja modal yang bersumber dari pendanaan pemerintah pusat serta pendapatan asli suatu daerah sangat berperan untuk digunakan supaya bisa terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena disini berhubungan dengan perkiraan yang akan digunakan untuk memodali pembangunan suatu daerah baik dalam hal sarana publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pemerataan pembangunan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *reserach gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya oleh (Kusumawati & Wiksuana, 2018) mengenai dampak perolehan daerah kepada pertumbuhan ekonomi menghasilkan DAU dan DBH berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi sedangkan untuk perolehan daerah bersumber dari PAD, DAK berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan hasil pengkajian oleh (Sulaeman & Silvia, 2019) terkait pengaruh faktor PAD, belanja modal, dan TKDD pada pertumbuhan ekonomi dengan temuan jika DAK tidak memiliki dampak, dan untuk PAD, DBH, DAU memiliki dampak yang positif signifikan, dan hal serupa terjadi untuk belanja modal.

Selanjutnya pengkajian oleh (Samsir et al., 2021) dengan hasil yang tidak selaras pada kondisi asli di lapangan diketahui bahwa dana desa tidak memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Hasil berbeda ditemukan dalam penelitian tentang faktor penyebab pertumbuhan ekonomi yaitu indeks pembangunan manusia, dana desa, serta kemiskinan di Kabupaten Bima oleh (Rimawan & Aryani, 2019) hasilnya diketahui jika pemanfaatan dana desa mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bergerak positif. Disisi lain ipm dan juga alokasi dana desa tidak memiliki dampak pada kemiskinan.

Selain itu (Pinem et al., 2020) meneliti tentang pengaruh faktor Silpa, Dak, Pad pada pertumbuhan ekonomi dan melibatkan belanja modal sebagai variabel moderasi. Hasilnya bersama-sama ketiga variabel berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan individual Dak, Silpa tidak memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, untuk Pad memiliki pengaruh signifikan dan variabel moderasi mampu memoderat jalinan hubungan Dak pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini berbeda dengan hasil pada penelitian oleh (Harahap et al., 2018) tentang faktor-faktor yang berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi menemukan bahwa beberapa faktor yaitu leverage, efektivitas rasio, rasio kemerdekaan, efisiensi rasio, pad, ukuran berdampak secara bersama-sama dan positif kecuali leverage tidak berefek pada Y

Sementara itu, Ghani et al, (2021) dalam temuan pengkajiannya mengenai ikatan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi memiliki defisit aspek fiskal yang berkepanjangan dan berakibat menegatifkan signifikan output dineraca anggaran. Hal itu memiliki arti jika tingginya dependensi negara antar pemerintah untuk bantuan dana dan hibah.

Berawal dari penelitian lebih dahulu diatas, yang membedakan penelitian ini adalah perbedaan komponen variabel yang digunakan yaitu dana bagi hasil dan dana desa serta penambahan variabel belanja modal sebagai variabel moderasi. Selain itu penelitian ini juga dilakukan dalam ruang lingkup wilayah koridor Indonesia menggunakan data tahun terbaru. Sehingga dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah faktor dana bagi hasil (dbh) dan dana desa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten di koridor bali – nusa tenggara dan apakah belanja modal memoderasi hubungan dana bagi hasil (dbh) dan dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten di koridor bali – nusa tenggara. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil dan dana desa dengan belanja modal sebagai variabel moderasi di Koridor Bali-Nusa Tenggara.

METODE PENELITIAN

Daerah Kabupaten yang ada di Koridor Bali – Nusa Tenggara digunakan untuk tempat pengkajian ini. Secara keseluruhan daerah Kabupaten Koridor Bali – Nusa Tenggara berjumlah sebanyak 37 Kabupaten. Sedangkan untuk sampel mamakai cara *purposive sampling* dan berasal dari pemerintah daerah

kabupaten yang ada di Koridor Bali – Nusa Tenggara selama periode 2015 – 2021 (7 tahun), sehingga jumlah sampel data yang digunakan sebanyak 259 pemerintah daerah. Dalam pemilihan sampel data, kriteria yang digunakan yaitu pemerintah daerah kabupaten secara menyeluruh yang ada di Koridor Bali – Nusa Tenggara dengan publikasi data yang lengkap dan tervalidasi oleh badan ataupun lembaga yang berkaitan dengan tema penelitian selama periode 2015 sampai 2021. Data tersebut diantaranya meliputi laju pertumbuhan ekonomi, dana bagi hasil, dana desa, dan belanja modal.

Jenis regresi data panel diterapkan untuk mengolah data dalam pengkajian ini dan dibantu mengolah menggunakan program Eviews versi 9. Keunggulan-keunggulan dalam mengukur dan menemukan akibat secara baik yang dimiliki data panel tidak terdapat di cara deret waktu maupun penyilangan. Perilaku yang kompleks dimungkinkan untuk ditelaah pada data panel yang menyebabkan tidak dibutuhkannya uji asumsi klasik (Gujarati 1992) selain itu untuk pengujian asumsi klasik karena bias dapat diminimalkan oleh data panel maka hal tersebut bisa memunculkan informasi lebih banyak maupun jenis yang ada pada analisis (Gujarati 2012).

Analisis data dilakukan pertama dengan menentukan model terbaik diantara model common effect, model fixed effect dan model random effect. Hal ini dilakukan dengan uji chow, uji hausman dan uji LM. Namun dalam hal ini, tidak perlu semua uji dilakukan, jika dari kedua uji sudah menemukan model yang paling sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, maka uji yang satunya tidak perlu dilakukan. Kedua dengan melakukan uji hipotesis sebelum melibatkan variabel moderasi belanja modal yaitu uji t, uji F dan uji R-square. Ketiga melakukan pengujian variabel moderasi menggunakan interaksi setiap variabel X dengan variabel moderasi Z. Dalam hal ini menggunakan perkalian antara variabel X1 dengan variabel Z dan variabel X2 dengan variabel Z. Pada akhirnya hasil uji moderasi akan menghasilkan output yang akan memberikan gambaran apakah variabel Z adalah variabel moderating.

Persamaan model regresi data panel yang merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series* yang digunakan dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut :

$$1. Y = \alpha + \beta_1 DBH + \beta_2 DD + e \dots\dots\dots (1)$$

$$2. Y = \alpha + \beta_1 DBH + \beta_3 BM + \beta_5 DBH.BM + e \dots\dots\dots (2)$$

$$3. Y = \alpha + \beta_2 DD + \beta_4 BM + \beta_6 DD.BM + e \dots\dots\dots (3)$$

Dimana :

- Y : Pertumbuhan Ekonomi
- α : Koefisien Konstanta
- $\beta_1 - \beta_6$: Koefisien Regresi
- DBH : Dana Bagi Hasil
- DD : Dana Desa
- BM : Belanja Modal

e : error

Pada penelitian ini dua uji yang dilakukan untuk mendapatkan model terbaik yakni dengan uji chow dalam menentukan model CE atau FE, dengan uji hausman untuk menentukan model RE atau FE. Setelah itu dilakukan uji hipotesis sebelum melibatkan variabel moderasi yaitu melihat R-squared, uji t, uji f dengan klasifikasi signifikan probabilitas t dan f hitung variabel tidak lebih dari 0,05. Selanjutnya uji moderasi dilakukan untuk tiap variabel dan menambahkan interaksi masing-masing variabel bebas dengan variabel moderasi. Penentuan variabel moderating dilihat dari nilai signifikansi variabel interaksi yang mana harus lebih kecil dari 0,05. Setelah itu melakukan uji hipotesis kembali dengan melibatkan variabel moderasi dengan tujuan untuk melihat apakah variabel moderasi benar-benar memperkuat hubungan antara variabel X terhadap Y.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada analisis regresi data panel, diperlukan model yang paling sesuai untuk digunakan pada analisis selanjutnya. Pemilihan model yang paling sesuai melalui beberapa uji sebagai berikut :

Tabel 1. Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	0.000000	(36,220)	1.0000
Cross-section Chi-square	0.000000	36	1.0000

Berdasarkan hasil tabel 1 menunjukkan jika probability cross section F adalah sebesar 1,0000, dimana nilai tersebut adalah lebih besar dari 0,05 sehingga diputuskan untuk menerima H0. Artinya sesuai dengan kriteria, pada uji chow ini model common effect adalah yang lebih sesuai dan perlu dilakukan uji selanjutnya yaitu uji lagrange multiplier (LM).

Tabel 2. Uji LM

	Cross-section	Time	Both
Breusch-pagan	21.58333 (0.0000)	4662.000 (0.0000)	4683.583 (0.0000)

Hasil dari tabel 2, menunjukkan koefisien breusch-pagan adalah sebesar 0,0000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga diputuskan untuk menolak H0 dan menerima H1. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kriteria dan hasil pengujian LM maka model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah model random effect.

Tabel 3. Hasil Regresi Model Random Effect (tanpa melibatkan variabel moderasi)

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	22.53798	9.792019	0.0000
X1_DANA_BAGI_HASIL	-0.141076	-3.335625	0.0010
X2_DANA_DESA	-0.255687	-5.866883	0.0000
R-squared	0.407449		
F-Statistic	0.000000		

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R2)

Berdasarkan tabel 3 diatas diketahui nilai R-squared nya adalah sebesar 0,407449. Angka ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 40,74% yang sisanya 59,26% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Uji F

Nilai prob F-statistic adalah sebesar 0,000000. Angka tersebut lebih kecil dari 0,05 yang artinya variabel independen Dana Bagi Hasil dan Dana Desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi.

Uji T

Persamaan regresi data panel tanpa melibatkan variabel moderasi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = 22.53798 - 0.141076DBH - 0.255687DD + e$$

Diketahui Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien -0,141076 dan signifikan dengan nilai prob sebesar $0,0010 < 0,05$. Sama halnya untuk Dana Desa berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien -0,255687 dan signifikan dengan nilai prob sebesar $0,0000 < 0,05$.

Tabel 4. Uji Moderasi Z (BM) Pada Pengaruh DBH Terhadap Y

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	48.20193	3.919441	0.0001
X1_DANA_BAGI_HASIL	-0.697603	-5.049643	0.0000
Z_BELANJA_MODAL	-0.157316	-3.474594	0.0006
X1Z	0.088590	3.817406	0.0002

Tabel 5. Uji Moderasi Z (BM) Pada Pengaruh DD Terhadap Y

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	41.79134	2.925294	0.0038
X2_DANA_DESA	-0.942374	-3.850877	0.0001
Z_BELANJA_MODAL	-0.091688	-2.925131	0.0038
X2Z	0.058712	3.417001	0.0007

Berdasarkan hasil uji moderasi tabel 4 dan 5 diatas, maka untuk model persamaan regresi dengan melibatkan variabel moderasi dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. $Y = 48,20193 - 0,697603DBH - 0,157316BM + 0,088590DBH.BM + e$
(melibatkan moderasi x1)
2. $Y = 41,79134 - 0,942374DD - 0,091688BM + 0,058712DD.BM + e$
(melibatkan moderasi x2)

Hasil uji moderasi menunjukkan jika variabel Belanja Modal merupakan variabel moderating. Karena dalam hasil analisis memiliki nilai koefisien interaksi X1.Z sebesar 0,0002 dan X2.Z yang sebesar 0,0007. Artinya nilai tersebut adalah lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel Belanja Modal (Z) merupakan variabel moderating dalam hubungan antara X1 (DBH) dan X2 (Dana Desa) terhadap Y (pertumbuhan ekonomi).

Tabel 6. Hasil Regresi Model Random Effect (melibatkan variabel moderasi) Dalam Hubungan DBH Terhadap Y

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	48.20193	3.919441	0.0001
X1_DANA_BAGI_HASIL	-0.697603	-5.049643	0.0000
Z_BELANJA_MODAL	-0.157316	-3.474594	0.0006
X1Z	0.088590	3.817406	0.0002
R-squared	0.713794		
F-Statistic	0.000000		

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R²)

Nilai R-squared diketahui sebesar 0,713794. Angka ini menunjukkan bahwa variabel X1 (Dana Bagi Hasil), Z (Belanja Modal), dan variabel interaksi X1.Z dapat menjelaskan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 71,38% yang sisanya 28,62% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Uji F

Nilai probabilitas F statistik adalah sebesar 0,000000 dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05 yang artinya variabel X1 (Dana Bagi Hasil), Z (Belanja Modal), dan variabel interaksi X1.Z secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y (pertumbuhan ekonomi).

Uji T

Variabel X1 (Dana Bagi Hasil) memiliki nilai koefisien parameter sebesar -0.697603 dan probabilitas signifikansi 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Variabel Z (Belanja Modal) memiliki nilai koefisien parameter sebesar -0,157316 dengan signifikansi 0,0006 yaitu lebih kecil dari 0,05. Variabel X1.Z (interaksi DBH dan Belanja Modal) memiliki nilai koefisien parameter sebesar 0,088590 dengan signifikansi 0,0002 (< 0,05) sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel Z (Belanja Modal) merupakan variabel moderating.

Tabel 7. Hasil Regresi Model Random Effect (melibatkan variabel moderasi) Dalam Hubungan DD Terhadap Y

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	41.79134	2.925294	0.0038
X2_DANA_DESA	-0.942374	-3.850877	0.0001
Z_BELANJA_MODAL	-0.091688	-2.925131	0.0038
X2Z	0.058712	3.417001	0.0007
R-squared	0.651745		
F-Statistic	0.000000		

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R²)

Dari hasil tabel 7 diketahui nilai R Squared (R²) sebesar 0,651745. Artinya variabel X2 (Dana Desa), Z (Belanja Modal), dan variabel interaksi X2.Z dapat menjelaskan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 65,17% yang sisanya 34,83% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Uji F

Probabilitas F statistik adalah sebesar 0,000000 dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05 yang artinya variabel X2 (Dana Desa), Z (Belanja Modal), dan variabel interaksi X2.Z secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y (pertumbuhan ekonomi).

Uji T

Variabel X2 (Dana Desa) memiliki nilai koefisien parameter sebesar -0.942374 dan probabilitas signifikansi 0,0001 yang lebih kecil dari 0,05. Variabel Z (Belanja Modal) memiliki nilai koefisien parameter sebesar -0,091688 dengan signifikansi 0,0038 yaitu lebih kecil dari 0,05. Variabel X2.Z (interaksi Dana Desa dan Belanja Modal) memiliki nilai koefisien parameter sebesar 0,058712 dengan signifikansi 0,0007 lebih kecil dari 0,05. Sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel Z (Belanja Modal) merupakan variabel moderating.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi

Temuan pemeriksaan regresi data panel memperlihatkan bahwa secara simultan dana bagi hasil dan dana desa memiliki pengaruh yaitu signifikan pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Koridor Bali – Nusa Tenggara karena prob F-statistic nya 0,000000 yang tidak melebihi 0,05 .

Sedangkan untuk pengujian secara parsial atau uji T menghasilkan pengaruh bahwa antara variabel DBH pada pertumbuhan ekonomi berdampak negatif kemudian signifikan karena memiliki prob yang senilai 0,0010 tidak lebih dari 0,05 serta ditemukan untuk koefisiennya -0,141076. Artinya bisa dijelaskan jika perolehan DBH setiap kabupaten di wilayah Koridor Bali – Nusa Tenggara semakin besar atau meningkat maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Koridor Bali – Nusa Tenggara akan menurun. Temuan dari pemeriksaan ini tidak bisa membuktikan dari perolehan Sulaeman & Silvia (2019) yang menemukan jika

DBH memiliki dampak signifikan positif pada pert.ekonomi. Sehingga boleh dijelaskan ketika semakin tinggi jumlah DBH yang diterima daerah Kabupaten akan berpengaruh terhadap penurunan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah koridor Bali – Nusa Tenggara. Kondisi ini disebabkan karena dalam pemanfaatan realisasi DBH yang diterima tidak secara dominan dipergunakan untuk pembangunan maupun upaya peningkatan pembangunan yang nantinya akan berdampak langsung secara positif bagi pertumbuhan ekonomi. Adapun pemanfaatan DBH yang digunakan sebagai pembangunan daerah hanya sebagian kecil yang mana tidak berakibat besar pada keadaan meningkatnya perkembangan ekonomi daerah kabupaten di Wilayah Koridor Bali – Nusa Tenggara.

Hasil pengujian untuk pengaruh variabel Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa Dana Desa ternyata berakibat negatif dengan koefisien -0,255687 dan prob 0,0000 yang tidak melebihi 0,05. Artinya jika semakin tinggi realisasi Dana Desa yang diterima oleh setiap daerah, maka laju pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Koridor Bali – Nusa Tenggara akan menurun. Hal ini disebabkan karena penggunaan Dana Desa oleh setiap daerah secara keseluruhan belum dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Selain itu juga dalam Dana Desa ini sendiri, masih tergolong dalam biaya anggaran pemerintah yang baru, karena untuk mengetahui pengaruh Dana Desa dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan waktu dalam jangka panjang. Sedangkan berdasarkan Undang- undang Dana Desa baru dianggarkan sejak tahun 2015, yang terhitung sampai saat ini baru selama 7 tahun. Temuan penelitian ini sejalan dari hasil riset oleh Samsir et al (2021).

Pengaruh Belanja Modal memoderasi hubungan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi

Analisis moderasi memiliki hasil yang berarti variabel belanja modal merupakan variabel moderating. Pengujian moderasi disini dengan menggunakan variabel interaksi yaitu perkalian antara variabel independen dengan variabel moderasi. Variabel Belanja Modal termasuk variabel moderasi karena pada hasil pengujian menunjukkan jika nilai koefisien variabel interaksi adalah sebesar 0,0002 untuk β_4 (interaksi X1.Z) dan 0,0007 untuk β_5 (interaksi X2.Z) yang artinya nilai tersebut adalah signifikan karena berada dibawah atau kurang dari 0,05.

Hasil pemeriksaan moderasi disini belanja modal menjadi variabel moderating yang menguatkan jalinan hubungan DBH dan DD pada Pert.Ekonomi karena nilai R-squared mengalami peningkatan dari hasil regresi sebelum melibatkan variabel moderasi. Diketahui nilai R-squared pada analisis regresi pertama adalah sebesar 0,407449 atau 40,74% dan setelah dilakukan regresi kedua dengan melibatkan variabel moderasi yaitu Belanja Modal, nilai R-squared meningkat menjadi 0,713794 atau 71,38% untuk variabel Dana Bagi Hasil dan 0,651745 atau 65,17% untuk variabel Dana Desa. Artinya disini dengan adanya Belanja Modal maka akan dapat memperkuat

hubungan Dana Bagi Hasil dan Dana Desa pada pertumbuhan ekonomi. Sehingga ketika realisasi belanja modal yang digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten di Koridor Bali – Nusa Tenggara semakin tinggi, maka akan memperkuat pengaruh DBH dan Dana Desa pada pertumbuhan ekonomi. Dari sini bisa dijelaskan pada saat penggunaan Belanja Modal Kabupaten di Koridor Bali – Nusa Tenggara banyak difungsikan untuk pembangunan daerah yang pada akhirnya mengakibatkan meningkatnya kondisi pertumbuhan ekonomi. Temuan dari penelitian ini selaras atas penelitian sebelumnya oleh Pinem et al., (2020) yang menemukan jika Belanja Modal mampu memoderasi DAK pada pertumbuhan ekonomi yang didalam ini berarti Belanja Modal berperan sebagai variabel moderasi dalam DAK yang juga termasuk dalam Dana Perimbangan.

KESIMPULAN

Dana Bagi Hasil dan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Koridor Bali – Nusa Tenggara. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Koridor Bali – Nusa Tenggara. Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Koridor Bali – Nusa Tenggara. Belanja Modal dapat berperan sebagai variabel moderating yang memperkuat hubungan antara Dana Bagi Hasil dan Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Koridor Bali – Nusa Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Hamzah, A., & Risma, O. R. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1994-2020. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 5(1), 49–56.
- Badan Pusat Statistik, 2022. (2022). *Laju Produk Domestik Regional Bruto*. Badan Pusat Statistik, Provinsi Bali.
<https://bali.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html#subjekViewTab1>
- Cahyaning, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(1), 20–38.
<https://doi.org/10.20473/jiet.v3i1.7874>
- Dewi, N. M. S., & Sutrisna, I. K. (2015). Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(6), 621–636.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/12254/12351>
- Ghani, J. A., Senan, M. K. A. M., Abdullahi, A. A., & Noor, N. M. (2021). Fiscal Decentralisation and Economic Growth Across States: New Evidence from Malaysia. *International Journal of Economics and Management*, 15(3), 463–477.
- Harahap, J. P. R., Daulay, M., & Torong, Z. B. (2018). Pengaruh Faktor Kinerja

- Keuangan, Size, Leverage, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *News.Ge*, 2, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(5), 2592. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i05.p12>
- Muttakin, A. F., & Cahyono, H. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5(3), 1–6.
- Pinem, I., Mardha, F., & Malau, Y. N. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017. *JIMEK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 3(2), 201–218. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jimek/article/view/1003>
- Prasetyo, T. A., & Dinarjito, A. (2021). Analisis pengaruh dana desa dan indeks pembangunan manusia per kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(4), 375–391. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.336>
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287–295. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/22539>
- Samsir, A., Hakim, A., & Fauziah, N. (2021). *Dampak Transfer Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan Indonesia*. 1136–1143. <https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/25276>
- Saputra, B. R. (2016). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Atas Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38651/1/BAMBANG_RIZKI_SAPUTRA-FEB.pdf
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(1), 97–112. <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i1.61>
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35–55. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>